



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KONFERENSI NASIONAL PEMEBERANTASAN KORUPSI “URGENSI SISTEM INTEGRITAS PARTAI POLITIK”

**SUKSESKAN
PILPRES DAN
PEMILU 2019**





Ir. H. JOKO WIDODO
Presiden Republik Indonesia



TJAHJO KUMOLO, SH.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia



Drs. H. M. JUSUF KALLA
Wakil Presiden Republik Indonesia

NAWA CITA

2014 - 2019

1. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA
2. MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA
3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN
4. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA
5. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA
6. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL
7. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGERAKAN SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK
8. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA
9. MEMPERTEGUH KE-BHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA



PENDAHULUAN

01

Partai politik secara filosofis dapat diterjemahkan bebas sebagai wadah

02

Partai politik sangat strategis dalam menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara

03

Membangun integritas di sektor politik sebagai perspektif pemberantasan korupsi

04

Rendahnya integritas dalam berpolitik dapat menjadi ancaman

05

Sistem integritas partai politik dapat dimaknai sebagai perangkat kebijakan



DINAMIKA DAN PROBLEMATIKA EKSISTENSI PARTAI POLITIK

Para politisi kurang memahami secara seksama tugas dan fungsinya



Adanya kondisi keterbatasan politisi dalam aspek hukum



Kurang maksimalnya partai politik dalam melakukan filterisasi rekrutmen



Perbaikan tidak berdasarkan kebijaksanaan



ISU KRUSIAL EKSISTENSI PARTAI

Partai politik dipandang kurang peka dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat

Terjerat pada oligarki di lingkaran elite pengurusnya

Mengalami deideologisasi kronis

Lemahnya kualitas etika dan sumber daya manusia yang duduk sebagai elite partai politik



KONDISI MANAJEMEN TATA KELOLA ORGANISASI KEPARTAIAN



STRUKTUR ORGANISASI

2

- Oligarki akut, kooptasi keluarga
- Tersentralisasi
- Gemuk (sangat besar)
- Dicengkram oleh personalisasi [orang kuat]
- Rekrutmen tidak terbuka/sebagian ditunjuk (patron klien politik)

KADERISASI

4

- Sebagian besar sistem kaderisasi tidak berjalan
- Kaderisasi "tradisional"
- Sumber kaderisasi partai lebih didasarkan pada siapa yang punya modal
- Mobilitas "tersendat"

1 SISTEM NILAI INTEGRITAS

- Tidak semua memiliki (**Sistem Etika**)
- Bersifat abu-abu [tidak jelas]
- Rata-rata tidak mengatur secara jelas bagaimana etika akan ditegakkan
- Penegakan etik sifatnya SPORADIS

3 PENDANAAN/LOGISTIK

- Tergantung pada orang kaya/pemodal
- Biaya operasional yang besar
- Patron-klien (ekonomi)





REKRUTMEN POLITIK/KANDIDASI

5

1. Sebagian besar dikuasi oleh sedikit orang
2. Sistem sangat tertutup
3. Tidak memiliki standar baku dalam rekrutmen politik
4. Transaksional

SISTEM PEMILU

7

1. Biaya politik yang tinggi/transaksional dalam rekrutmen politik (kandidasi politik)
2. Rekrutmen politik (kandidasi politik) sangat ditentukan dan pada kasus-kasus tertentu "dijegal" oleh elit partai
3. Sistem tertutup dan oligarki kandidasi (rekrutmen politik) rawan penyimpangan dan korupsi
4. Untuk menjadi anggota DPR/DPD DAN DPRD sangat tergantung pada "modal yang dimiliki"
5. Untuk menjadi kandidat gubernur/wakil, bupati/wakil → ada gejala sewa perahu (candidate buying) dan transaksi politik



6

SISTEM KEPARTAIAN

1. Biaya politik yang tinggi
2. Partai didorong dimiliki secara personal seperti CV atau PT melalui Badan Hukum
3. Badan hukum partai tidak pernah direview/dievaluasi, sehingga partai-partai papan nama bisa memperjualbelikan badan hukum yang dimiliki
4. Tidak mengatur persyaratan sistem integritas/etika sebagai kewajiban bagi partai
5. Tidak jelas mengatur mengenai kaderisasi



**Dalam UUD 1945, eksistensi partai politik
tidak dibahas secara spesifik**

1

**Konstitusi tidak mengatur substansi
penting kepartaian**

2

**Dasar hukum partai politik dibuat
dalam setiap era pemerintahan**

3

**Diperlukan peningkatan integritas
partai politik**

4



**ANALISIS YURIDIS DAN
KETATANEGARAAN
INTEGRITAS PARPOL**

UPAYA PEMERINTAH MENGHADIRKAN PARTAI POLITIK YANG BERINTEGRITAS



1. Melakukan Revisi atas PP 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol
2. Melakukan revisi atas UU No.2/2008 yang diubah dengan UU No.2/2011 tentang Parpol

PENINGKATAN BANTUAN KEUANGAN PARPOL

PENGATURAN PRIORITAS BANTUAN PARPOL

- a. Melaksanakan program pendidikan politik rekrutmen dan kaderisasi yang baik, operasional Sekretariat parpol
- b. Pelaksanaan kode etik politisi
- c. Pelaksanaan Pendidikan politik kepada masyarakat
- d. Pembenahan kelembagaan serta tata kelola keuangan Parpol

Dilakukan perencanaan dan pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan kepada pengurus parpol

KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA PARPOL

SOSIALISASI PROGRAM PADA KAMPANYE

Agar negara mengatur dalam UU Pemilu tentang pemberian bantuan dalam bentuk nature (in kind) berupa air time di setiap stasiun TV kepada setiap parpol untuk mensosialisasikan programnya pada masa kampanye sebagai bagian dari pendidikan politik

1. Memiliki kode etik dan kode perilaku serta kelembagaan yang memadai untuk pelaksanaannya.
2. Memiliki kode etik dan kode perilaku serta kelembagaan yang memadai.

KEWAJIBAN PENGURUS PARPOL



LANGKAH STRATEGIS YANG SUDAH DILAKSANAKAN KEMENDAGRI



Dalam upaya mewujudkan integritas partai,
kementerian dalam negeri telah menerbitkan regulasi

- 1 **Permendagri Nomor 71 Tahun 2012**
- 2 **Permendagri Nomor 36 Tahun 2014**
- 3 **Permendagri Nomor 62 Tahun 2017**
- 4 **Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018**
- 5 **Permendagri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 133 Tahun 2017**

Menerbitkan regulasi **1**

Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap
eksistensi partai **2**

Mengupayakan desain penyelenggaraan pemerintahan
yang efektif, efisien **3**



TERIMA KASIH